

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berbasis agraris yang menempatkan sektor pertanian serta arah pembangunan nasional sebagai unsur krusial dalam menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh warga negara. Di samping itu, pertanian juga berperan besar dalam mendukung pendapatan negara melalui devisa. Setiap program pembangunan di bidang ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mencapai kemandirian pangannya. Namun, realisasi tujuan tersebut dihadapkan pada berbagai hambatan, yang terutama menyusutnya lahan pertanian produktif dan meningkatnya jumlah penduduk. Salah satu pendekatan guna mengatasi tantangan ini yaitu masalah yang terjadi pada lingkungan masyarakat dengan cara pengoptimalan dalam pemanfaatan lahan (Heri Mulyani, 2020).

Kemiskinan merupakan isu global yang hingga kini belum terselesaikan. Sebagai respons terhadap masalah ini, pada bulan September 2015, sebanyak 189 negara berkumpul dan menyepakati sebuah deklarasi internasional MDGs, atau Tujuan Pembangunan Milenium, dicanangkan dengan salah satu misi utamanya untuk memangkas kemiskinan global hingga 50% pada tahun 2015. Inisiatif ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius yang tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak. (Nawir1, 2022).

Indonesia sebagai negara berkembang terus menghadapi masalah kemiskinan yang tak kunjung usai, menjadikannya tantangan besar bagi pemerintah untuk ditangani. Masalah ini bersifat kompleks dan tetap menjadi salah satu persoalan utama yang menuntut penanganan segera. (Hardana, 2023). Ketimpangan sosial yang tinggi akibat adanya distribusi kesejahteraan yang tidak merata di Indonesia merupakan salah satu faktor utama penyebab kemiskinan itu terjadi. Kondisi kemiskinan sering juga dijadikan indikator penting untuk menilai kesejahteraan sebuah rumah tangga. Biasanya semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu

daerah, semakin baik pula kesejahteraan masyarakatnya dikarenakan kemiskinan dianggap cerminan utama kondisi hidup warga. (Nawir1, 2022).

Upaya pengentasan kemiskinan yang ada di desa, ini sesuai dengan arah dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan SDGs Desa nomor satu, yaitu membangun desa yang terbebas dari kemiskinan. Tujuannya ini menempatkan desa sebagai pusat pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan lokal untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Salah satu strateginya dapat mengimplementasikan peningkatan ekonomi petani melalui program-program inovatif seperti penyediaan teknologi pertanian modern, penguatan akses pasar, diversifikasi usaha tani, serta pendampingan yang berkelanjutan. Kebijakan berbasis kebutuhan lokal ini, melibatkan para petani sebagai aktor utama dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi pedesaan.

Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur, akses terhadap teknologi yang masih rendah, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak terintegrasi sering kali menyebabkan program pembangunan desa tidak efektif dalam meningkatkan taraf hidup seorang petani. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pendekatan yang sifatnya holistik dan berbasis data untuk memastikan program-program peningkatan ekonomi petani tersebut dapat berjalan secara optimal. (Bonaraja Purba, 2024)

Sektor pertanian di Indonesia terbagi menjadi 5 sub sektor utama, yaitu hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Sub sector hortikultura mencakup berbagai komoditas sayur dan buah yang juga termasuk tanaman obat adalah bagian dari hortikultura yang sangat bermanfaat. Kandungan vitamin dan mineralnya menjadikannya sumber gizi utama bagi masyarakat. Dengan terpenuhinya gizi, kualitas manusia juga meningkat, dan hal ini penting dalam mendorong kemajuan ekonomi. (Endang Sri Sudalmi, 2015)

Desa merupakan awal dari sebuah pembangunan nasional itu dilakukan, hal ini dikarenakan desa mempunyai potensi penting berupa sumber daya manusia dan alam. Oleh karena itu, pembangunan desa perlu mendapat perhatian serius, baik dari desa ataupun pemerintah daerah itu sendiri. Dalam hal ini desa menjadi pondasi utama untuk pengembangan di sebuah wilayah yang berperan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mendukung perekonomian petani. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kepala desa memegang peran sentral sebagai tokoh kunci dalam membuka akses terhadap program pemberdayaan, khususnya di sektor pertanian di Desa Purwoharjo.

Arah Kebijakan Perekonomian Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi yang telah disusun, dimana dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, pembangunan dengan konteks ekonomi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, dengan sasarannya ialah meningkatnya produktivitas dan daya saing yang berpotensi unggul di daerah yang berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi desa dalam konteks SDGs Desa No. 1 dapat diintegrasikan melalui peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor utama. Dengan strategi seperti ini meningkatnya akses pasar, penguatan investasi di sektor agribisnis, serta pendampingan teknis bagi petani, pemerintah dapat mendorong penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya terciptanya desa tanpa kemiskinan melalui penguatan ekonomi petani sebagai penggerak utama perekonomian dipedesaan.

Arah kebijakan RPD Banyuwangi dalam mengintegrasikan implementasi SDGs Desa, pemerintah juga dapat menjembatani kebutuhan local dengan mengagendakan pembangunan global. Hal ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berdampak pada penurunan kemiskinan, tetapi juga menciptakan desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sumber daya manusia, infrastruktur, dan inovasi desa menjadi faktor kunci dalam pencapaian target ini.

Faktor utama yang menjadi kendala dalam proses transisi pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang pertama karena jarangya pelatihan, sistem administrasi dan birokrasi di desa belum bisa dijalankan dengan optimal sehingga desa belum mampu menjalankan pengelolaan secara efektif. Kedua, terkait akuntabilitas pemerintah desa dalam mengeloladana desa yang cukup besar, di

mana masih terdapat kesulitan dalam pengelolaan anggaran secara transparan dan efisien.

Kewuel (2020) mengatakan bahwa pembangunan desa sering kali tersendat karena banyak program tidak selaras dengan tradisi dan budaya lokal yang ada. Beliau juga berpendapat bahwa pembangunan seharusnya berakar pada nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan begitu, berbagai kegiatan pembangunan yang ada di desa memperoleh fondasi yang kokoh, di mana masyarakatnya berperan sebagai elemen utama dalam proses tersebut. Keberhasilan pembangunan ini, tidak hanya diukur dari peningkatan infrastruktur fisik namun juga dari tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai budaya masyarakat yang semakin diperkuat seiring berjalannya waktu. (Nila, 2021)

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya mewujudkan SDGs desa no 1 desa tanpa kemiskinan melalui program untuk meningkatkan ekonomi pada setor pertanian lewat gabungan kelompok tani yang menjadi sangat penting untuk memberikan solusi terhadap tantangan yang menghambat peningkatan hasil pertanian mereka, seperti masalah teknis dalam budidaya, kesulitan dalam pemasaran, harga yang tidak stabil, dan minimnya akses terhadap modal serta teknologi yang kurang memadai.

Pemerintah desa berupaya dalam membentuk dan juga sebagai pemberdayaan kelompok tani. Kelompok tani ialah wadah yang dapat mengorganisir petani agar saling berkoordinasi mengenai masalah yang sering terjadi, mulai dari pembelian pupuk dan benih yang lebih murah, pelatihan tentang teknik budidaya yang efektif, hingga memfasilitasi pemasaran hasil pertanian. Menurut Kementerian Pertanian, kelompok tani merupakan himpunan petani, peternak, dan pekebun yang terbentuk karena mereka memiliki tujuan, kebutuhan, dan kondisi yang serupa. Karena hubungan yang erat di antara anggotanya, mereka bekerja sama untuk mengembangkan usaha mereka. Kelompok ini dibuat oleh petani untuk kepentingan mereka sendiri, sebagai cara untuk saling membantu menyelesaikan masalah pertanian dan memperkuat posisi mereka di pasar.

Kelompok tani dalam satu wilayah administratif desa dikembangkan menjadi sebuah himpunan yang lebih besar, yang disebut Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Terbentuknya Gapoktan ini terdiridari beberapa kelompok tani yang

ada di desa Purwoharjo, namanya Gapoktan Dewi Sri yang beranggotakan 7 kelompok tani di Desa Purwoharjo yang terdiri dari kelompok tani margo mulyo, kelompok tani margo karyo, kelompok tani margo tani, kelompok tani margo makmur, kelompok tani srisakti, kelompok tani sri rejeki, dan kelompok tani sri kusumo.

Peran lain yang dilakukan Pemerintah Desa Purwoharjo ialah dengan menjalankan Program Kredit Usaha Tani (KUT), yang merupakan salah satu program untuk memberikan akses permodalan kepada petani kecil guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Program ini menjadi bagian penting dalam upaya mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuannya, yaitu menghapus kemiskinan, serta mengakhiri kelaparan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa, KUT berkontribusi pada terciptanya desa tanpa kemiskinan melalui berbagai aspek strategis. Penyaluran Program Kredit Usaha Tani (KUT) serta berbagai bantuan pemerintah lainnya biasanya kegiatan ini dijalankan lewat kelompok tani karena cara ini dianggap lebih cepat dan tepat. Maka dari itu, tiap desa pun diminta untuk membentuk kelompok tani agar bisa mendapatkan layanan dari pemerintah. Proses penerapan yang dilakukan petani secara otomatis dimasukkan sebagai anggota kelompok tersebut. Hal ini menyebabkan banyak petani tidak mengetahui kelompok mana yang mereka ikuti atau siapa yang menjadi ketua kelompoknya. (Wati, 2024).

Program pemerintah desa yang masih berjalan hingga saat ini yaitu Program Ketahanan Pangan. Tujuan dari Program ketahanan pangan di Desa Purwoharjo ini ialah untuk menjamin akses pangan yang memadai, terutama dalam menghadapi tantangan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi. Program ketahanan pangan ini juga sebagai alat optimalisasi lahan kosong untuk budidaya tanaman pangan yang bernilai gizi tinggi dan juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Purwoharjo dari sector pertanian melihat banyak sekali masyarakat Desa Purwoharjo yang memiliki sawah dan lahan kosong yang tidak dimanfaatkan dengan baik karna masalah factor ekonomi.

Program Ketahanan Pangan ini sangatlah membawa perubahan yang signifikan terhadap hasil pendapatan ekonomi masyarakat Desa Purwoharjo. Melalui program ini keluhan masyarakat terutama bagi para petani sedikit demi sedikit mulai teratasi. Pemerintah Desa Purwoharjo dianggap sudah mampu dalam menyediakan kebutuhan masyarakat karna dapat dilihat dari buku tahunan Desa Purwoharjo yang menunjukkan bahwasanya setiap tahunnya pendapatan mereka bertambah. Jumlah penghasilan para petani di Desa Purwoharjo mencapai Rp. 3.870.000, 00 perkapita. Hal ini dapat disimpulkan dengan adanya peran pemerintah Desa Purwoharjo dalam menjalankan Program ketahanan pangan yang ditargetkan pada sector pertanian guna mewujudkan target SDGs Desa tercapai. Dalam hal ini maka Pemerintah Desa Purwoharjo memberikan arahan dan bantuannya melalui Program Ketahanan Pangan yang ada di Desa Purwoharjo.

Desa Purwoharjo memiliki pencapaian yang unggul terutama pada sektor pertanian, dikarenakan wilayah Banyuwangi bagian selatan ini terkenal dengan penghasilan petani yang melimpah dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang menjadi contoh daerah-daerah lain di Kabupaten Banyuwangi. Purwoharjo adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan luas hampir 9 km², desa ini dihuni oleh sekitar 9.379 jiwa. Mayoritas warganya berprofesi sebagai petani, dengan jumlah mencapai lebih dari 6.651 orang. Selain itu, ada pula 530 keluarga buruh tani yang secara keseluruhan terdiri atas 1.171 orang. Masyarakatnya yang memanfaatkan lahan untuk ditanami padi, jagung, kedelai, jeruk, buah naga, dan lain lain.

Buku rekapan tahunan Desa Purwoharjo menjelaskan bahwasanya di tahun 2023 salah satu contoh produksi tanaman bahan makanan di Desa Purwoharjo adalah tanaman padi dengan jumlah pendapatan 5,00 ton/ha dengan luas wilayah 206,00 Ha. Tanaman jeruk dengan jumlah penghasilan 4, 00 Ton/ha yang memiliki luas wilayah 10,00 Ha. Ir. Ikrori Hudanto, yang memimpin Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan, menjelaskan situasi yang terjadi di Banyuwangi khususnya di daerah Purwoharjo sendiri Jenis jeruk yang diunggulkan adalah jeruk siam, yang dikenal dengan cita rasa manis berpadu sedikit asam, menciptakan sensasi kesegaran yang berbeda dibandingkan dengan

jeruk impor yang umumnya hanya manis. Selain itu, jeruk lokal ini mengandung air lebih banyak dibandingkan jenis lainnya, seperti jeruk ponkam atau jenis jeruk dari luar negeri lainnya, yang dikenal lebih hemat dari sisi harga, yaitu sekitar Rp10–14 ribu per kilogram, sedangkan jeruk impor dijual dengan harga lebih tinggi, yakni antara Rp20–25 ribu per kilogram.

Pemerintah Desa Purwoharjo memberikan bantuan yang berupa benih padi, benih jagung, dan 200 bibit jeruk kepada kelompok tani di Desa Purwoharjo untuk dikembangkan, dan juga pupuk organik. Pemerintah Desa Purwoharjo juga memberikan bantuan berupa alat oprasi guna membantu dalam pengerjaan program ini yang berupa mesin singkal yang di salurkan lewat para gapoktan. Bantuan lain juga diberikan Pemda kabupaten Banyuwangi yang di salurkan lewat desa dan kemudian diserahkan kepada petani.

Pemerintah desa di Desa Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, telah berperan cukup efektif sebagai fasilitator dalam upaya pemberdayaan kelompok tani. Peneliti yang melakukan pengamatan langsung menemukan bahwa aparat desa mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, terutama saat musim tanam tiba. Misalnya, petani kini lebih mudah memperoleh pupuk, bahkan sebagian warga telah didaftarkan oleh pemerintah desa sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Namun demikian, masih terdapat salah satu masalah yang sering dirasakan petani ialah mahalnya pupuk non-subsidi, yang terpaksa digunakan ketika pupuk bersubsidi tidak tersedia. Selain itu permasalahan serius lainnya adalah ketiadaan saluran irigasi yang mempersulit petani dalam mengairi lahan pertanian mereka.

Pokok permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini mendorong peneliti untuk lebih jauh menyelidiki bagaimana peran nyata pemerintah desa dalam memberdayakan warganya khususnya dalam konteks sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Purwoharjo melalui sektor pertanian dengan memanfaatkan peran kelompok tani yang ada di Desa Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.

2.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memusatkan perhatian peneliti pada bagaimana pemerintah Desa Purwoharjo berupaya mewujudkan cita-cita “Desa Tanpa Kemiskinan”

sebagaimana tercantum dalam SDGs Desa melalui upaya peningkatan perekonomian kelompok tani ?

2.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mencapai target SDGs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan, melalui kebijakan yang difokuskan pada peningkatan perekonomian para petani di Desa Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.

2.4 Manfaat Penelitian

2.4.1 Manfaat Teoritis.

Pembahasan dalam penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan beserta wawasan yang luas penulis dan pembaca skripsi ini mengenai upaya pemerintah desa dalam mewujudkan SDGs Desa Nomer 1 desa tanpa kemiskinan melalui program meningkatkan perekonomian petani di Desa Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

2.4.2 Manfaat Praktis.

Penelitian ini disusun sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir guna memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember.